



PERAN PRESIDEN JOKOWI DALAM MENJAGA WILAYAH LAUT NATUNA

Kevin Satria Hidayat, Aulia Srifauzi

Prodi Hubungan Internasional Universitas Potensi Utama Medan

kevinsatriahidayat28192@gmail.com

ABSTRAK

Pada awalnya Indonesia bukan peng-klaim laut cina selatan. Namun pada tahun 2010 Indonesia jadi ikut terlibat dalam sengketa laut cina selatan atau laut natuna. Setelah cina secara sepihak mengklaim terhadap keseluruhan wilayah laut natuna. Termasuk didalamnya ialah perairan ZEE Indonesia, yaitu kawasan di utara kepulauan Natuna Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2019, presiden Jokowi memberikan pesan kuat terkait natuna. Wilayah itu memiliki kekayaan alam yang sangat dipertimbangkan dengan adanya migas dan satwa yang ada. Presiden Jokowi memiliki tujuan yang kuat untuk membangun dan memperkuat wilayah laut cina selatan dan kepulauan natuna. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Menggunakan teori Konstruktivisme, *The Copenhagen School*, dan Keamanan internasional sebagai konsep akan mempermudah penulis mengerjakan penelitian ini. Presiden Jokowi telah melakukan upaya yang cukup besar dalam menjaga wilayah laut natuna atau laut cina selatan. Jokowi lebih suka melakukan dengan cara diplomasi dan damai karena menurutnya ancaman berlebihan adalah tindakan yang akan mempersulit keadaan dan tidak akan menemukan perdamaian dan penyelesaian sengketa yang terjadi.

Kata Kunci: Keamanan Internasional, Konstruktivisme, Laut Cina Selatan

PENDAHULUAN

Dinamika perebutan wilayah di kawasan Laut China Selatan (LCS) akibat klaim yang saling tumpang tindih masih menjadi isu keamanan utama di kawasan ASEAN. Secara geografis, LCS memiliki luas wilayah sekitar 3 juta km² dan terletak di antara pantai selatan Tiongkok dan Taiwan di sebelah Utara, pantai negara-negara Asia Tenggara di sebelah Barat, gugusan pulau di Filipina di sebelah Timur, serta Kalimantan dan Indonesia di sebelah Selatan. Terdapat sepuluh negara yang berbatasan dengan LCS yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Sementara itu, kawasan yang menjadi titik panas dalam sengketa ini adalah kawasan laut dan daratan di gugusan kepulauan Paracel dan Spratly.

Sengketa LCS pertama kali terjadi pada dasawarsa 1970-an dan masih belum menemui titik akhir hingga saat ini. Sejumlah negara yang terlibat dalam sengketa LCS, sebagai claimant states, yaitu Tiongkok, Filipina, Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Taiwan, yang mengklaim sebagai bagian dari kedaulatan negaranya masing-masing. Tiongkok menggunakan dasar historis, sedangkan claimant states lainnya menggunakan dasar geografis yang mengacu pada Konvensi Hukum Laut Internasional (Sulistiyani et al., 2021).



LCS menjadi kawasan yang diperebutkan karena memiliki nilai strategis sebagai Sea Lines of Trade (SLOT) dan Sea Lines of Communication (SLOC) yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, sehingga membuat jalur LCS sebagai jalur tersibuk di dunia. Setengah lalu lintas perdagangan dunia tercatat melalui kawasan tersebut. Selain itu, LCS juga memiliki nilai ekonomis dengan adanya sumber daya alam berupa cadangan minyak dan gas alam. Nilai strategis tersebut membuat setiap claimant states berupaya untuk mempertahankan kepentingan nasional mereka masing-masing dengan melakukan berbagai manuver, mulai dari peluncuran peta nine dash line oleh Tiongkok, pengajuan gugatan Filipina terhadap Tiongkok ke Pengadilan Arbitrase Permanen PBB, hingga tindakan asertif seperti pembangunan pulau-pulau buatan dan kehadiran militer Tiongkok di LCS. Kompleksitas isu LCS bahkan telah membuat great power seperti Amerika Serikat (AS) turut “hadir” melalui kekuatan militernya dengan meningkatkan frekuensi aktivitas Freedom of Navigation Operation (FONOPS) untuk menentang ekspansi Tiongkok di kawasan tersebut (Utomo et al., n.d.).

Dalam perkembangannya, konflik LCS juga mulai “menyeret” Indonesia sejak tahun 2010, setelah Tiongkok mengklaim wilayah utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Sementara itu, Tiongkok beralasan pihaknya berhak atas perairan di Kepulauan Natuna atas dasar argumen traditional fishing zone (Dugis, 2018). Klaim sepihak Tiongkok atas perairan Natuna masih terus berlanjut hingga membawa Indonesia dan Tiongkok pada situasi “bersitegang” pada tahun 2013 dan mencapai puncaknya tahun 2016. Pada Maret, Mei, dan Juni 2016 tercatat sejumlah kapal-kapal nelayan Tiongkok berlayar memasuki wilayah ZEE Indonesia dan melakukan sejumlah kegiatan illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU fishing).

Insiden tersebut kembali terjadi pada tahun 2019 dan 2020, dimana kali ini tidak hanya kapal-kapal nelayan yang terlibat, tetapi coast guard Tiongkok juga melakukan pelanggaran serupa. Berbagai insiden pelanggaran di atas terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara Tiongkok dan Indonesia. Pemerintah Tiongkok mengklaim bahwa kapal-kapal nelayannya berhak untuk berlayar dan coast guardnya berhak berpatroli di area nine dash line. Sementara itu, pemerintah Indonesia tidak mengakui nine dash line dan menganggap bahwa Tiongkok telah melakukan pelanggaran di wilayah ZEE Indonesia, yaitu di perairan Laut Natuna Utara.



Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepentingan nasional Indonesia di kawasan LCS dan bagaimana respons Indonesia di tengah dinamika sengketa LCS pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Dugis, 2018)

Penulis meyakini bahwa sangat penting untuk melakukan analisis terhadap peran presiden Jokowi dalam menjaga wilayah laut Natuna karena klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok. Penulis memiliki perspektif bahwa konflik ini harus diteliti lebih lanjut karena posisi geografis laut Natuna sangat menguntungkan bagi Indonesia. Kekayaan alam dan keanekaragaman hayatinya menjadi hal yang sangat penting. Jokowi mengambil peran penting dalam menjaga wilayah laut Natuna. Ia lebih memilih mengambil jalan atau cara dengan berdiplomasi. Hal ini dinilai sangat baik ketimbang mengambil cara yang kasar atau dengan cara memberikan ancaman secara militer kepada pihak pengklaim.

Penelitian terdahulu yang membahas kasus yang sama yaitu terdapat dalam jurnal penelitian ilmu hubungan internasional Tomy Darma Putra yang berjudul: "Pengaruh Kepribadian Presiden Jokowi Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Studi Kasus Pelanggaran Cina Di Natuna". Penelitian ini lebih menitikberatkan pengaruh kepribadian seorang presiden dalam mengambil keputusan terkait konflik laut Natuna. Namun dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan bagaimana peran presiden Jokowi secara nyata dan tegas (Darma Putra, 2019).

Penulis melakukan penelitian saat ini bersifat aktual mengingat fenomena yang penulis angkat dalam penelitian ini sudah cukup lama terjadi bahkan masih dalam proses yang berlanjut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif sehingga data-data yang dikumpulkan oleh penulis didapat melalui media elektronik, jurnal, buku, dan artikel.

KERANGKA TEORI & KONSEP

Keamanan Internasional

Secara etimologis konsep keamanan atau security berasal dari Bahasa Latin "securus" (se + cura) yang bermakna terbebas dari bahaya, terbebas dari ketakutan. Pendekatan tradisional yang didominasi oleh Realisme menyatakan bahwa konsep keamanan merupakan sebuah kondisi yang terbebas dari ancaman militer atau kemampuan suatu bangsa untuk melindungi negaranya dari serangan militer negara lain.

Keamanan didefinisikan sebagai kemampuan bertahan diri dari ancaman yang nyata. Isu keamanan internasional senantiasa meramaikan Kajian Hubungan Internasional. Sebagai salah satu bidang kajian utama, konsep keamanan dalam Kajian Keamanan Internasional mengalami perkembangan melalui perdebatan-perdebatan, dari keamanan yang bersifat tradisional (politik-militeristik) sampai non-tradisional (manusiawi dan alternatif). Teks-teks keamanan tradisional yang berlaku pada masa Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Perang Dingin dengan batasan keamanan yang memfokuskan pada negara sebagai aktor kunci keamanan (*pivotal player*), sumber ancaman sekaligus pencipta stabilitas keamanan, mengalami anomali (*changes and challenges*).

Barry Buzan dalam bukunya yang berjudul *People, States and Fear* mengatakan bahwa "*security, in any objective sense, measures the absence of threat to acquired values, in a subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked*" (Barry, 1991). Menurut Barry Buzan, makna konsep keamanan tidak hanya meliputi aspek militer dan aktor negara saja melainkan meliputi aspek-aspek non-militer dan non-aktor. Dalam bukunya yang berjudul



“People, States and Fear”, Buzan membagi keamanan kedalam 5 (lima) bidang yaitu militer, lingkungan, politik, ekonomi, dan societal. Aspek militer hanya salah satu aspek penting dalam dimensi keamanan, akan tetapi juga lebih kepada peace and security. Dimensi keamanan ada perubahan yang dipahami sifatnya secara multidimensional dan bagaimanapun menjaga suatu negara dan individu yang ada didalamnya.

Menurut John H. Herz dalam bukunya yang berjudul *Political Realism and Political Idealism* menyatakan bahwa dalam konsep keamanan terdapat kondisi suatu negara yang meningkatkan pertahanan dan keamanan guna untuk menghindari ancaman dari luar yang menyebabkan negara – negara sekitarnya merasa terancam dan melakukan tindakan yang serupa, sehingga kondisi tersebut dapat menyebabkan ketegangan bahkan memicu konflik yang disebut dengan dilema keamanan.

Suatu negara menganggap bahwa upaya yang dilakukannya yaitu bersifat defense yaitu usaha untuk mengurangi kemampuan lawan untuk menguasai sesuatu dari pihak negara tersebut dengan tujuan untuk melawan pihak yang menyerang guna meminimalisir kerugian apabila upaya deterrence gagal. Deterrence merupakan tindakan ancaman militer terhadap pihak lain dengan maksud untuk mencegah agar pihak lain tidak melakukan tindakan agresif atau melakukan serangan militer. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi.

Kondisi tersebut dapat terjadi karena sulitnya membangun kepercayaan antar negara, kegagalan dalam membangun komunikasi, faktor sejarah. Pada akhirnya akan berdampak dengan adanya persaingan antar-negara untuk meningkatkan keamanan masing – masing, membentuk aliansi, memicu ketegangan dalam situasi internasional, perlombaan senjata, berpotensi terhadap timbulnya perang.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II tatanan global mengalami perubahan. Sehingga konsep keamanan semakin berkembang dengan munculnya isu – isu non-tradisional seperti terorisme, cyber, kemanusiaan, lingkungan hidup yang dimana membawa dampak negatif terhadap tatanan dunia secara global. Selain itu, aktor yang terlibat tidak hanya negara saja tetapi aktor non-statet seperti organisasi kejahatan transnasional ataupun individu yang melakukan tindak kejahatan dan mengganggu stabilitas suatu negara atau bahkan secara global. Konsep keamanan baru yang diperdebatkan adalah:

- Keamanan Bersama (*Common security*).
Diperkenalkan oleh komisi Palme (*The Palme Commission*) pada tahun 1980-1981. Keamanan ini berbicara bahwa mereka percaya hubungan antar aktor yang saling bermusuhan bisa dirubah dengan menciptakan kebijakan keamanan yang saling transparan dan tidak agresif. Tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan rasa saling curiga akan maksud pihak lain untuk mencegah konflik bersenjata.
- Keamanan Komprehensif (*Comprehensive security*).
Keamanan ini meliputi semua aspek kehidupan manusia, negara wajib memberikan perlindungan keamanan ekonomi, sosial, politik dan lingkungan hidup diluar keamanan militer secara fisik bagi setiap warga negaranya. Dari keamanan ini, melahirkan konsep keamanan manusia (*human security*)
- Keamanan Kooperatif (*Cooperative security*).



Bentuk kerjasama keamanan yang paling longgar. Memanfaatkan semua saluran yang mengacu kepada semua aspek keamanan. Bentuk-bentuk kerjasama yang soft (tranparansi, normatif, dan tidak punya kekuatan untuk implementasi).

Dengan semakin banyaknya isu – isu yang berkembang dalam Hubungan Internasional, keamanan tidak terfokus kepada kekuatan militer saja tetapi juga dapat berkaitan dengan ekonomi internasional, organisasi internasional, hukum internasional (Burhanuddin, 2017). Kemudian, UNDP (United Nations Development Programme) mengidentifikasi 7 (tujuh) kategori ancaman yang perlu dicermati secara serius, diantaranya:

1. Keamanan Ekonomi.
2. Keamanan Pangan.
3. Keamanan Kesehatan.
4. Keamanan Lingkungan Hidup.
5. Keamanan Pribadi.
6. Keamanan Komunitas.
7. Keamanan Politik (Volger & Annan, 2021).

Keamanan merupakan hal yang sangat penting dan perlu dipenuhi oleh negara karena menyangkut kepada rasa aman dari masyarakatnya itu sendiri. Sehingga, suatu negara dapat terbebas dari ancaman baik dari internal negara itu sendiri ataupun eksternal.

Konstruktivisme

Konstruktivisme adalah suatu pandangan yang menyatakan bahwa hubungan internasional sebagai salah satu bentuk hubungan sosial yang merupakan hasil dari interaksi faktor-faktor material dan faktor-faktor ideational. Dinamakan konstruktivisme karena semua interaksi merupakan hasil dari konstruksi sosial konstruktivis merupakan pandangan gabungan antara liberalis dan realis. Misalnya: “state of nature” yaitu agar sebuah norma berlaku, diperlukan sebuah pemaksaan, namun tidak dengan cara-cara militer. Konstruktivisme atau bisa juga disebut Post positivism dapat diasumsikan bahwa ilmu tidak ada yang netral, karena objek yang diteliti dan subjek yang meneliti tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu Konstruktivis sangat menghargai ide karena hakikat ilmu sosial tidak pernah bebas nilai.

Menurutrealis, kondisi dunia anarki dan tidak dapat dirubah, ketika aktor memasuki interaksi, kepentingan sudah ada terlebih dahulu. Namun konstruktivisme melihat kepentingan baru tercipta ketika aktor memasuki interaksi. Konstruktivis tidak percaya bahwa anarki dan hubungan internasional itu permanen dan semata-mata dibentuk oleh aspek material. Anarki itu bisa dirubah melalui “*learning process*”.

Lalu, apa lagi setelah konstruktivisme? Pertanyaan ini muncul dari asumsi konstruktivis juga bahwa kebenaran itu berjalan karena ia bersifat paradigmatic. Perkembangan isu dan fenomena akan terus melahirkan anomali-anomali, dan anomali-anomali ini melahirkan kritik-kritik dan perdebatan baru yang kemudian melahirkan kesepakatan dan ketidaksepakatan baru, dan berujung pada munculnya paradigma baru. Konstruktivisme adalah capaian mutakhir dalam HI. Tetapi kini sudah mulai bermunculan kritik terhadap paradigma tersebut, dan kritik-kritik itu tidak mustahil akan merupakan embrio paradigma pasca-konstruktivisme (Zakarias, 2020).



Konstruktivisme adalah perbedaan cara pandang mengenai metodologi riset di antara para konstruktivis. Di satu sisi, para konstruktivis interdisiplin tidak mau sepenuhnya mengakui dan mengadopsi metodologi ala perspektif teori kritis, dan sebaliknya menyanggah metodologi dan teori kritis dengan unsur-unsur positivisme. Konstruktivisme adalah seperangkat argumentasi tentang karakteristik sistem, perilaku aktor serta proses interaksi yang ditujukan untuk mengatasi kesulitan dan/atau kelemahan yang ditemukan dalam neo-neo rasionalisme sebagai paradigma akademik HI. Oleh sebab itu, konstruktivisme memuat berbagai jenis gagasan yang tidak disampaikan maupun kritik terhadap neorealisme dan neoliberalisme (Dugis, 2018).

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari para individu maupun perilaku yang diamati. Peneliti memilih desain penelitian ini karena fenomena yang diteliti dapat dieksplorasi dengan menggunakan berbagai sumber data. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif analisis sehingga mempermudah peneliti untuk menyajikan data yang diperoleh secara komprehensif. Peneliti memperoleh data dari sumber data primer seperti dokumen resmi dan sumber data sekunder seperti jurnal, buku, media, dan situs resmi. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh John W. Creswell, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisa data-data yang telah diperoleh. Selanjutnya, peneliti menyajikannya dalam bentuk deskriptif analisis, tabel, ataupun grafik yang dapat mendukung informasi mendetail mengenai penelitian ini. Langkah terakhir yakni penarikan kesimpulan yang bersifat interpretasi dari data yang telah dianalisis (Fiantika, 2022).

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Faktor Penyebabnya Keterlibatan Pemerintah Indonesia Dalam Permasalahan Laut Cina Selatan

Tuntutan atas klaim yang di ajukan oleh pemerintahan RRC atas kepemilikan dan kawasan Laut Cina Selatan yang dilakukan oleh Cina sejak dekade 1970 didasarkan pada tiga hal pokok yakni kemajuan tingkat perekonomian masyarakat, politik, dan kebutuhan akan pertahanan dan keamanan, Selain itu hal ini juga didasari akibat adanya kebangkitan Cina dan kekuasaan dari pengaruh Amerika, terutama yang terjadi di kawasan Asia Tenggara juga menghadirkan suasana baru pada bidang pergerakan dunia saat ini. Kebangkitan Cina memberikan tanda akan adanya perubahan dalam keseimbangan kekuatan baru dalam hubungan internasional.

Dalam hal ini semakin panasnya persaingan antara wilayah barat yang selama ini dikomandoi oleh Amerika dengan kekuasaan Cina yang mulai bangkit ,hal ini tentunya berdampak sangat besar terhadap kedudukan negara lainnya khususnya di Asia Tenggara seperti Indonesia yang cenderung bersifat netral dan tidak memihak pihak manapun sehingga menjadi rawan akan adanya usaha untuk mendapatkan simpati dari pihak yang berkonflik guna mendapat dukungan atas apa yang dilakukan.

Dalam kasus yang terbaru dalam berita CNBC Indonesia tanggal 8 February 2021 menyebutkan dalam sebuah artikel dalam buletin Sekolah Staf Umum dan Komando Angkatan Darat Indonesia bulan Desember 2020, atau Seskoad pernah menyimpulkan Cina sedang



bersiap-siap apabila memerlukan serangan yang besar kepada musuh-musuhnya di LCS. "Operasi militer Cina di Kepulauan Natuna sangat dekat karena mereka memiliki niat dan kemampuan militer untuk melakukan serangan besar dari markas mereka di Kepulauan Spratly." Per September 2019, Bakamla memergoki kapal penjaga pantai Cina di ZEE Indonesia dalam perairan LCS. RI kemudian mengirimkan nota protes ke Beijing. Kapal penjaga pantai Cina juga ditemukan kembali masuk tanpa izin di perairan Natuna pada Desember 2019, bahkan Bakamla pernah mencegat sebuah kapal survei Cina yang sedang melewati jalur laut kepulauan Indonesia. Kapal tersebut mematikan Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) tiga kali, dengan kapten mengklaim bahwa sistem tersebut rusak. Hal ini tentunya menjadi ancaman bahaya tersendiri bagi kedaulatan wilayah Indonesia (Anam, 2022).

Banyak faktor yang mengakibatkan RRC sangat gigih dalam memperjuangkan wilayah laut Cina Selatan yang kaya akan potensi, salah satunya yaitu sebagai dampak dari Pembangunan penduduk yang cepat memperhitungkan peningkatan pemanfaatan energi minyak. Bagi Cina, dalam jangka panjang, penghematan minyak di Laut Cina Selatan, meskipun dalam jumlah yang tidak pasti, bagaimanapun juga akan digunakan untuk membantu kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan akan cadangan minyak yang melimpah dari sumber-sumber baru telah dirasakan sejak pertengahan tahun 1970-an, ketika produksi minyak China mengalami penurunan. Elemen luar, khususnya darurat minyak dunia, juga berdampak pada ekonomi lokal pada pentingnya penghematan minyak. Peluruhan ini berlanjut ke dekade berikutnya meskipun jumlah spesifiknya tidak diketahui. Bisa dibayangkan kenyataan ini dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan penduduk dan industrialisasi selama program modernisasi. Kecenderungan ini mempengaruhi minat masyarakat terhadap sumber bahan bakar mineral yang terus berkembang.

Sebagai hasilnya, Cina harus memperluas impor minyak dan gas, mengembangkan lebih lanjut kapasitas penciptaan atau partisipasi bersama dalam menyelidiki wilayah tepi laut. Meningkatnya minat China terhadap minyak dapat dilihat dari strategi impor pada tahun 1993. Bahkan diperkirakan kebutuhan energi China, khususnya minyak, akan melampaui ukuran penciptaannya.

Untuk mengurangi impor minyak, dalam jangka panjang negara ini akan memanfaatkan Laut Cina Selatan sebagai tempat untuk mendapatkan ladang minyak baru dan sebagai jalur lalu lintas pertukaran. Dari sudut politik, kasus ini identik dengan teknik strategi internasional China terhadap negara-negara Asia Tenggara.

Ada beberapa hal yang dikaitkan menjadi alasan dengan perjuangan terus menerus di dekatnya. Sebagai permulaan, para ahli tertentu menjamin bahwa kawasan Laut Cina Selatan memiliki kekayaan normal (SDA) yang melimpah. Pada tahun 1968, ditemukan penghematan minyak yang memperluas nilai Laut Cina Selatan. Potensi penghematan minyak di Kepulauan Spratly dan Paracel diperkirakan mencapai 105 miliar barel dan di seluruh Laut China Selatan sebanyak 213 miliar barel. Organisasi Data Energi AS menilai bahwa penyimpanan gas dan minyak di Laut Cina Selatan adalah yang terbesar ketujuh di planet ini.

Wilayah ini dinilai memiliki 190 triliun kaki bensin gas. Organisasi otonom itu juga memperkirakan ada 11 miliar barel minyak yang disimpan di Laut Cina Selatan. Kedua, area dasarnya selalu luar biasa bagi berbagai negara untuk mengklaimnya. Kawasan Laut Cina Selatan yang menghubungkan kedua laut tersebut menjadi jalur persimpangan yang paling digandrungi kapal-kapal dunia. Mengaitkan bisnis dari Eropa, Timur Tengah, Australia ke Jepang, Korea, Cina, dan berbagai negara



Alasan lain yang menjadikan faktor pendorong RRC ingin menguasai wilayah Laut Cina Selatan karena mereka menganggap wilayah Laut Cina Selatan sebagai wilayah teritorial Cina untuk memproyeksikan peranan strategisnya secara aktual. Adanya keterlibatan Beijing yang merupakan musuh dari RRC dalam konflik ini dianggap hanya untuk menegaskan kembali bahwa itu bukan negara besar di bidang teritorial. Akhir dari perjuangan Kamboja telah mengubah bagian dari Beijing, yang baru-baru ini memanfaatkan masalah ini untuk menarik negara-negara non-sosialis ke dampaknya. Melalui langkah ini, China memiliki opsi untuk melepaskan posisi Vietnam di tingkat kawasan. Penyelesaian Kamboja mempengaruhi gaya strategi internasional China terhadap negara-negara Asia Tenggara, khususnya yang merupakan individu dari ASEAN. Sebagai usaha pilihan, bangsa penghias jendela bambu ini berusaha membina hubungan baru yang bermanfaat, khususnya di bidang politik dan keuangan. Strategi ini diperlukan sebagai upaya untuk menghilangkan kesan "risiko kuning atau bahaya dari utara". Isu bahaya kuning sering dikaitkan dengan pemberontakan sosialis yang terjadi di beberapa negara Asia Tenggara yang secara langsung atau implisit didukung oleh China. Isu ini dan selanjutnya episode Tiananmen yang terkait dengan pelanggaran kebebasan bersama telah merusak gambaran global (Gunawan Aura Ari, 2021).

Dari bidang perlindungan dan keamanan, kasus China diidentikkan dengan faktor blunder pengalaman masa lalu yang belum terfokus pada kemampuan laut. Pertama, faktor lemahnya kekuatan laut di sekitar China adalah peluang yang bekerja dengan infiltrasi pemerintah Barat yang akhirnya membawa pembagian domain China ke dalam kendali kekuatan asing. Selama Perang Virus, pandangan tentang bahaya bagi Soviet muncul dengan pengembangan instalasi tentaranya di Vietnam. Hal ini terlihat ketika China memberikan "latihan" kepada Vietnam (1979). Asosiasi Soviet juga telah mengirimkan apa pun kecuali penghalang bagi pasukan Angkatan Laut China di Pulau Hainan dan Kepulauan Paracel. Kedua, untuk kepentingan keamanan, China membutuhkan armada maritim yang solid dan basis-basis utama.

Strategi Keamanan Jokowi Di Natuna

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Laut Natuna-Natuna Utara. Hal ini merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan. Dalam peraturan tersebut, ada dua kebijakan untuk mewujudkan zona pertahanan dan keamanan di Natuna yaitu:

- Pengelolaan wilayah pertahanan secara efektif, efisien, dan ramah lingkungan.
- Peningkatan prasarana dan sarana pertahanan keamanan negara untuk mendukung kedaulatan dan pengamanan batas wilayah negara.

Adapun dalam pengelolaan wilayah pertahanan, ada empat strategi yang dicantumkan, yaitu:

- Peningkatan efektivitas kegiatan di wilayah pertahanan dengan memperhatikan pemanfaatan ruang lainnya.
- Pengendalian dampak lingkungan di daerah latihan militer.
- Pelaksanaan pertahanan dan keamanan secara dinamis.
- Peningkatan kapasitas, efektivitas, dan jangkauan pengelolaan pertahanan dan keamanan di wilayah perairan.



Sementara untuk peningkatan prasarana dan sarana pertahanan keamanan negara, ada beberapa strategi yang disiapkan. Mulai dari mengembangkan pos pengamanan perbatasan sesuai karakteristik wilayah dan potensi kerawanan, hingga menempatkan sarana bantu navigasi pelayaran sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan dapat menjamin keselamatan pelayaran. Aturan lain yang tercantum dalam perpres itu meliputi kebijakan dan strategi di berbagai bidang. Beberapa hal yang diatur adalah konservasi wilayah laut, perekonomian dan wisata, serta batas wilayah perairan Natuna dan Natuna Utara. Sebelumnya, perairan Natuna menjadi sorotan dunia. China mengklaim wilayah itu masuk dalam teritori mereka berdasarkan Sembilan Garis Putus. Sementara itu, negara-negara di ASEAN sepakat batas wilayah di sebagian Laut China Selatan telah ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) yang disahkan pada 1982 (Trihartono et al., 2020).

Sebagai informasi, Kabupaten Natuna nantinya akan memiliki kawasan ekonomi khusus (KEK). Pemerintah Kabupaten Natuna bahkan telah melakukan pertemuan dengan para pengusaha dan investor di Jakarta beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Natuna Wan Siswandi mengemukakan kabupaten Natuna memiliki potensi serta daya tarik ekonomi dari berbagai lini sektor, salah satunya perikanan. Ia mengatakan bahwa hampir 92% lebih natuna dikelilingi lautan dan tentunya memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi, khususnya hasil kelautan.

Sementara itu, Komisararis utama Lazuardo Vittorio Indonesia Tri Kusno Wibowo mengemukakan akan melakukan perumusan business plan dengan para innestor untuk melakukan sejumlah pembangunan di kawasan tersebut. Mulai dari pembangunan cold storage dan pengadaan armada pendingin serta suplai logistik untuk bermitra dengan pemkab natuna guna mensukseskan pembangunan kawasan ekonomi khusus (Anam, 2022).

Klaim Cina Terhadap Laut Cina Selatan Berdasarkan Teori Konstruktivisme

Semua berawal saat Cina mengklaim Laut Cina Selatan (LCS) sejak tahun 1947 saat Cina memproduksi peta LCS dengan 9 garis putus-putus dan menyatakan bahwa wilayah yang masuk kedalam lingkaran garis tersebut termasuk kepulauan Spratly dan Paracel sebagai wilayah teritorinya. Peta ini kemudian ditegaskan kembali pada saat Partai Komunis berkuasa pada 1953 (CNN TEAM, 2022).

Dalam teori konstruktivis klaim LCS ini didasari oleh dua kepentingan, yaitu kepentingan rasional dan modernisme atau postmodernisme. Untuk kepentingan rasional, Cina memiliki alasan yaitu didalam wilayah LCS didalamnya terdapat terumbu karang, pulau karang atau atol, ratusan pulau kecil tak berpenghuni, dua kepulauan besar yaitu kepulauan Spratly dan kepulauan Paracel. Pada kepentingan modernisme atau postmodernisme Cina memiliki alasan yang lebih mengarah kepada pendekatan budaya dan historis. Klaim ini didasarkan pada sejarah cina kuno, mulai dari dinasti Han yang berkuasa pada abad 2 SM sampai dengan dinasti Ming dan dinasti Qing abad 13 SM. Hingga pada akhirnya Cina memiliki *Geopolitic-Interst* berdasarkan teori konstruktivisme.

Kesimpulan

Meskipun Indonesia bukan merupakan negara pengklaim dalam sengketa LCS, namun Indonesia memiliki kepentingan nasional di LCS, khususnya dalam menjaga kedaulatan wilayah di Laut Natuna Utara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia senantiasa mencermati dinamika yang terjadi di LCS dan meningkatkan koordinasi antar institusi terkait baik di tingkat nasional maupun regional. Koordinasi antar institusi di tingkat nasional, seperti TNI AL,



Bakamla RI, POLAIR, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, harus terus ditingkatkan untuk mempertahankan kepentingan nasional Indonesia. Sementara itu, upaya diplomasi perdamaian pada tingkat bilateral, regional (baik melalui aktor eksekutif seperti pertemuan antar Menteri Luar Negeri maupun melalui aktor legislatif seperti AIPA), dan forum internasional dapat difokuskan pada upaya penyelesaian sengketa LCS guna menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan perdamaian di kawasan ASEAN. Melakukan kegiatan Biregionalisme antara ASEAN dengan negara besar lain tentunya akan memperkuat kerjasama antar negara di ASEAN dan tidak merasa takut akan ancaman dari Cina.



Daftar Pustaka

- Anam, K. (2022). Jokowi Rilis Aturan, Jaga Pertahanan dan Kedaulatan Natuna! *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220415082146-4-331906/jokowi-rilis-aturan-jaga-pertahanan-dan-kedaulatan-natuna>
- Barry, B. (1991). People, States and Fear. In A. Ware & V. Hoffmann-Martinot (Eds.), *An Agenda for International Security Studies in the Post ...* (2nd ed.). [http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:People,+States,+and+Fear#3](http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:People,+States,+and+Fear#3%5Cnhttp://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:People,+States+and+Fear#3)
- Burhanuddin, A. (2017). *Studi Keamanan Dan Isu-Isu Strategis Global*. LKPP Universitas Hasanuddin.
- CNN TEAM. (2022). Sejarah Konflik Laut China Selatan. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220511135122-118-795477/sejarah-konflik-laut-china-selatan-yang-jadi-rebutan>
- Darma Putra, T. (2019). Pengaruh Kepribadian Presiden Jokowi Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Studi Kasus Pelanggaran Cina Di Natuna. *Journal of International Relations*, 5(2), 323–331. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite:http://www.fisip.undip.ac.id/>
- Dugis, V. (2018). *Teori Hubungan Internasional ; Perspektif-Perspektif Klasik* (Issue December 2016).
- Fiantika, F. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Rake Sarasini* (Revisi, Issue March). PT. Remaja Rosdakarya Offset. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Gunawan Aura Ari, I. S. (2021). Peran Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Keutuhan Wilayah Maritim NKRI dalam Konflik Laut China Selatan. *Jurnal Sejarah & Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jambi*, 1(1), 14. <https://online-journal.unja.ac.id/jejak/article/view/13852>
- Sulistiyani, Y. A., Pertiwi, A. C., & Sari, M. I. (2021). Indonesia's Responses amidst the Dynamic of the South China Sea Dispute under Jokowi's Administration [Respons Indonesia di tengah Dinamika Sengketa Laut China Selatan di bawah Pemerintahan Jokowi]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 12(1), 85–103. <https://doi.org/10.22212/jp.v12i1.2149>
- Trihartono, A., Indriastuti, S., & Nisya, C. (2020). Keamanan dan Sekuritisasi dalam Hubungan Internasional. In *Melvana Publishing* (Issue 8). [https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/99470/Artikel 4 Agus Tri.pdf](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/99470/Artikel%204%20Agus%20Tri.pdf)
- Utomo, H., Prihantoro, M., & Adriana, L. (n.d.). *Peran pemerintah indonesia dalam mengelola konflik laut china selatan the role of indonesian government in managing of south china sea conflict*. 63–88.
- Volger, H., & Annan, K. (2021). Human Development Reports. In *A Concise Encyclopedia of the United Nations*. https://doi.org/10.1163/9789004481206_047
- Zakarias, C. (2020). Konstruktivisme Hubungan Internasional: Meretas Jalan Damai Perdebatan Antarparadigma. *Universitas Muhammadiyah Malang*.